

ABSTRAK

Pemerintah Kecamatan merupakan salah satu dari satuan perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang amanah, terpercaya, baik, dan bersih di tingkat kemukiman dan pedesaan atau Kelurahan. Peran strategis itu salah satunya ialah dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan kasus tanah, batas daerah yang akhir-akhir ini frekuensi konfliknya semakin meningkat. Berawal dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengamatan yang berjudul **“PERAN CAMAT DALAM MEYELESAIKAN SENGKETA TANAH DI WILAYAH KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU”**.

Tujuan dari pengamatan ialah untuk mengetahui kondisi kepemilikan tanah hak milik, untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah hak milik, dan untuk memahami peran Camat dalam penyelesaian sengketa tanah hak milik.

Metode pengamatan yang digunakan penulis adalah metode pengamatan eksploratif dengan pendekatan induktif serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi kepemilikan tanah hak milik di Kecamatan Selebar sudah cukup tertib, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah hak milik ialah belum memiliki alat yang canggih dan akurat seperti *Global Positioning System* (GPS) sebagai pendukung untuk melihat keadaan wilayah karena wilayah Kecamatan Selebar sangat luas. Selain itu, sistem koordinasi yang belum berjalan dengan baik antara pihak Kecamatan Selebar dengan Kantor Pertanahan Nasional Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil pengamatan, maka diharapkan agar Camat melakukan pengawasan terhadap ketertiban administrasi pertanahan dengan lebih memperketat pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) serta berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan pertanahan serta penyelesaian sengketa tanah. Selanjutnya peran Camat dalam menyelesaikan sengketa tanah dilakukan secara musyawarah mufakat sehingga antara pihak sama-sama merasa puas karena tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak perlu lagi menyelesaikan masalah sengketa tanah melalui pengadilan

ABSTRACT

*Sub district government is one of the local government's units which is in direct contact with society and has a strategic role in providing the best service for the community to create a mandatory government, reliable, good, and clean in the residential and rural or urban village. One of the strategic roles is in solving of land disputes; the boundary area conflict's frequency that is slightly increased in recent years. Beginning with this reason, the authors are interested in making observations entitled **"THE ROLE OF SUBDISTRICT HEAD IN LAND DISPUTE SOLVING IN SELEBAR SUBDISTRICT BENGKULU CITY."***

The purposes of the internship are to determine the condition of property ownership, to find out the problems encountered in solving of property rights disputes, and to understand the sub district head's role in solving of property disputes.

The author used the exploratory observation method with an inductive approach. Exploratory observation is an observation, which is aim, is to find a cause or something affecting the occurrence of something. Techniques of data collection were interview and documentation technique.

The observation's result shows that the conditions of land ownership of property in Selebar Sub district are orderly enough, but it still needs to be increased. Then the problems encountered in resolving property disputes are not have a sophisticated and accurate tools yet, like global positioning system (GPS), as a supporting to see the Selebar Sub district region that is extensive. In addition, the coordination's system that has not been going well between the Selebar Sub district and the National Land Affairs of Bengkulu City.

Based on observations, it is expected that the sub-district head to supervise the tighten of the administration's order in the publishing of Certificate of Land (SKT) in further, coordinate with agencies that has related to land, and land dispute resolution. Further, sub district head's role in solving of land disputes is done so that the consensus agreement between the parties are equally satisfied that no one was harmed, so we do not need to solve the problem of land disputes through the courts.